

SKRIPSI

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MITIGASI BENCANA

GUNUNG MERAPI

Di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta



Disusun Oleh:

FIKA NURAINI SAFITRI

16520111

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKA NURAINI SAFITRI

NIM : 16520111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana Gunung Merapi** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'METRAI TEMPEL', and the serial number '85124 JX892946552'.




Fika Nuraini Safitri

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

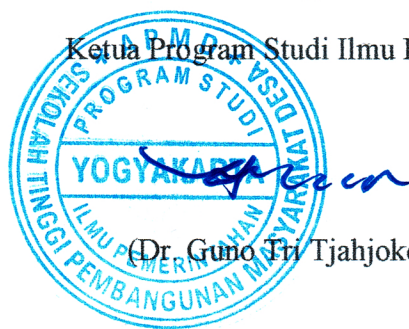
Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juli 2022
Pukul : 10.00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
I. Ketua /Pembimbing	Utami Sulistiana, S.P.,M.P	
2. Penguji Samping I	Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D	
3. Penguji Samping II	Ir. Nelly Tiurmida, MPA	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

MOTTO

Jangan mundur sebelum mencoba

Beban berat itu hanya ada pada pikiran

Coba dulu nanti akan terbiasa

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya selama ini, saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Sukijo dan Ibu Jariyah selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun moril.
3. Abah dan Bu Rita yang mendoakan saya dan memberi semangat supaya cepat mendapatkan gelar S-1.
4. Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan dan mendoakan, saya ucapkan terimakasih.
5. Semua pihak yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melaksanakan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S-1) melalui skripsi yang berjudul: **Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana Gunung Merapi** di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah beberapa bulan melaksanakan penelitian sampai tahap penyusunan, penyusun menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana skripsi S-1 yang telah teruji sebelumnya. Karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Penyusun sangat berterimakasih atas setiap masukan, kritikan sekaligus dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari pihak lain penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku dosen penguji 1 dalam ujian skripsi;
5. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku dosen penguji 2 dalam ujian skripsi;
6. Pemerintahan Kalurahan Harjobinangun, serta masyarakat Kalurahan Harjobinangun yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan wawancara, menggali informasi dalam rangka menyusun skripsi ini;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan partisipasinya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. <i>Governability</i>	8
2. Kapasitas.....	9
3. Pemerintah Desa.....	10
4. Mitigasi Bencana.....	15
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Unit Analisis.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Teknik Analisis Data.....	28
BAB II DESKRIPSI UMUM PROFIL KALURAHAN HARJOBINANGUN	
A. Kondisi Geografi.....	29
1. Sejarah Kalurahan Harjobinangun.....	29

2. Batas Administrasi	30
3. Letak Wilayah	32
4. Luas Wilayah	33
B. Aspek Demografis..	35
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	35
2. Jumlah RT dan KK Menurut Populasi Perpendudukan	36
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	37
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi	38
1. Berdasarkan Agama.....	38
2. Keadaan Ekonomi.....	39
3. Kemampuan Keuangan Kalurahan....	41
D. Sarana dan Prasarana.....	42
E. Struktur Pemerintahan Kalurahan Harjobinangun.....	44
 BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Informan.....	46
B. Analisis Data.....	47
1. Kapasitas (SDM) Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana Gunung Merapi	47
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Gunung Merapi.....	50
3. Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Gunung Merapi.....	54
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Informan.....	26
Tabel 2.1 Jumlah RW dan RT Perpadukuhan.....	30
Tabel 2.2 Jumlah Penggunaan Lahan.....	33
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Perpadukuhan.....	35
Tabel 2.4 Jumlah RT dan KK Perpadukuhan	36
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	37
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	38
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	39
Tabel 2.8 Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Harjobinangun.....	45
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Harjobinangun.....	33
Gambar 2.2 Daftar Anggota FPRB.....	46

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Harjobinangun.....	44
---	----

INTISARI

Gunung Merapi merupakan gunung teraktif di Indonesia dan memiliki siklus erupsi tahunan. Salah satu kalurahan yang termasuk dalam zona bahaya Gunung Merapi adalah Kalurahan Harjobinangun. Kalurahan Harjobinangun berada dalam radius 11 km bahaya Merapi. Karena Merapi memiliki siklus erupsi tahunan dan erupsinya tidak dapat di prediksi besar kecil atau sejauh mana kemungkinan dampak letusan tersebut, maka Kalurahan Harjobinangun tidak bisa mengabaikan kemungkinan terkena ancaman yang besar walaupun tahun-tahun sebelumnya dampak yang didapat tidak sebesar di kalurahan lain. Masyarakat Kaluraahn Harjobinangun harus tanggap, tagas dan tanggguh dalam menghadapi bencana. Namun yang menjadi masalah di Kalurahan Harjobinangun yaitu kurangnya perhatian kusus pada penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi. Informasi dan juga sosialisasi belum sepenuhnya tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi ini kemudian membuat peneliti mengambil judul **Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana Gunung Merapi**. Dengan rumusan masalah bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi di Kalurahan Harjobinangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, langsung ke sumber data. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive, dimana informan telah ditentukan oleh peneliti sebelum penelitian dilaksanakan dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, identifikasi data, intepretasi data dan kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi di kalurahan Harjobinangun sudah baik atau cukup. Karena keterbatasan sdm dari para aparatur kalurahan mengenai pengetahuan mitigasi bencana dan tidak semua aparatur desa memiliki pendidikan atau kemampuan dalam mitigasi bencana, maka pemerintah berupaya menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk membantu pemerintah kalurahan dalam pengembangan desa tangguh bencana. Seperti dalam sosialisasi atau simulasi mengenai mitigasi bencana mendatangkan narasumber dari BPBD. Karena informasi yang diberikan tidak tersebar merata, maka dalam mencegah bencana Merapi sebagian masyarakat mencari informasi sendiri melalui media digital. Penyebaran informasi mengenai mitigasi bencana Gunung Merapi bisa bisa tersebar merata apabila seluruh elemen yang ada bersinergi dalam mengantisipasi bencana tersebut dan tidak menunggu bencana itu datang baru bergerak.

Kata kunci. Kapasitas, Pemerintah Desa, Mitigasi Bencana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gunung Merapi merupakan gunung teraktif di Dunia yang berada di bagian tengah Pulau Jawa. Lereng sisi selatan Gunung Merapi berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena mengalami dekade erupsi setiap dua, lima sampai sepuluh tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang padat. Sejak tahun 1548 Gunung Merapi telah meletus sebanyak 68 kali atau rata-rata meletus dalam empat tahun, berjarak di bawah 30 km dari puncak gunung. Meski begitu siklus tahunan letusan Gunung Merapi tidak benar mutlak atau dikatakan tidak bisa menjadi acuan sebagai prediksi letusan. Karena letusan Merapi bisa terjadi sewaktu-waktu yang tidak bisa ditebak kapan akan erupsi. Gunung Merapi pernah istirahat Panjang atau tidak meletus selama 18 tahun.

Sejak tahun 1872-1931, letusan Merapi mengarah ke barat laut. Setelah letusan besar pada tahun 1930-1931 arah letusan berubah dengan dominan ke arah barat daya. Pada letusan tahun 1994 terjadi penyimpangan ke arah selatan yaitu ke hulu Kali Boyong, terletak antara bukit Turgo dan Plawangan. Sementara pada tahun 2001 letusan Merapi mengarah ke arah barat daya. Sementara pada tahun 2006 juga terjadi perubahan arah yaitu dari barat daya ke arah tenggara, dengan membentuk bukaan kawah yang mengarah ke Kali Gendol. Pada tahun 2010 diawali letusan *eksplosif* disertai dengan awanpanas dan dentuman. Berbeda dengan letusan erupsi sebelumnya yang bersifat *efusif* dengan pembentukan kubah lava dan guguran awanpanas. Pada 5 November 2010 terjadi

penghancuran kubah lava yang menghasilkan aliran awan panas hingga sejauh 15 km dari puncak Gunung Merapi ke arah Kali Gendol. Letusan besar ini kemungkinan terjadi sekali dalam 100 tahun dan *eksplosif* dengan jangkauan awan panas mencapai 15 Km.

Tahun 2001-2003 aktivitas tinggi Merapi terus-menerus. Pada tahun 2006 Gunung Merapi Kembali mengalami aktivitas tinggi dan menelan korban jiwa dua orang sukarelawan di kawasan Kaliadem karena terkena terjangan awan panas. Pada Oktober dan November tahun 2010, erupsi Gunung Merapi Kembali terjadi lagi dan merupakan erupsi yang terbesar sejak letusan tahun 1872. Sebanyak 273 orang meninggal per 17 November 2010 dan 500.000 masyarakat yang diungsikan. Namun letusan pada tahun 2010 dianggap menjadi penyimpangan dari letusan tipe Merapi karena bersifat eksplosif yang disertai suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-30 km dari Gunung Merapi. (<https://www.viva.co.id>) letusan Gunung Merapi 2010, jurukunci Merapi termasuk salah satu yang menjadi korban kedahsyatan erupsi Merapi yang meletus pada 25 Oktober setelah beberapa hari terjadi aktivitas Vulkanik. Karena kurangnya persiapan maka banyak kendala dan hambatan ketika erupsi 2010 pemerintah daerah belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada tahun Juli 2012 – April 2014 merapi kembali terjadi 6 kali letusan *freatik* yang terjadi tanpa gejala yang jelas. Sistematis pada April 2018 rendah dengan 40 kali gempa guguran. Kemudian pada 11 Mei-1 Juni 2018 Gunung Merapi Kembali terjadi 12 kali letusan freatik, 40 kali hembusan dan 130 kali gempa guguran. 21 Mei 2018 tingkat aktivitas Gunung Merapi Kembali di naikkan dari tingkat Normal ke tingkat Waspada. Pada pertengahan bulan Juni 2018 terjadi penurunan aktifitas terutama gempa guguran dan hembusan. Bulan Juli-Agustus 2018 kembali terjadi peningkatan aktivitas guguran besar

terdengar hingga di Babadan. Arah guguran lava pijar mengarah ke arah Kali Gendol dengan jarak luncur maksimum 300 meter. Tahun 2019 terjadi penurunan guguran, 4 kali letusan abu. (<https://news.detik.com>)

Status Gunung Merapi sampai 2022 pada level atau tingkat Siaga, karena aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi *efusif*. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awanpanas pada sektor Tenggara–Barat Daya sejauh maksimal 3 km ke arah sungai Woro dan sejauh 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan *eksplosif* dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Dampak dari letusan Gunung Merapi di Kalurahan Harjobinangun memang tidak begitu separah di bandingkan dengan kalurahan yang radius bahaya erupsi Gunung Merapi lebih dekat. Dampak yang ditimbulkan seperti penumpukan abu vulkanik yang menutupi permukiman dan juga persawahan. Selain itu lahan persawahan warga rusak karena tanaman layu mati terkena panasnya hujan abu sehingga para masyarakat gagal panen. Para peternak juga kehilangan sumber makanan untuk hewan ternaknya, karena rumput-rumput yang biasa mereka ambil sudah tertutupi oleh tebalnya abu dari Gunung Merapi. Bahkan dampak dari letusan Gunung Merapi abu vulkanik telah menutupi daerah Kota Yogyakarta dan mengganggu aktivitas warga.

Pada erupsi 2010 menjadikan pembelajaran yang sangat berarti bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan bencana gunung api baik dari sisi data teknis yaitu interpretasi, informasi kepada para masyarakat. Kejadian tersebut seharusnya menjadikan pembelajaran bagi Kalurahan Harjobinangun dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi. Karena aktivitas Gunung Merapi yang tidak dapat di prediksi kapan akan

terjadi letusan kecil atau besar dan tidak dapat ditentukan arah letusan serta sejauhmana jarak letusan erupsi tersebut dan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan. Pemerintah Kalurahan Harjobinangun harus mampu menyiapkan masyarakat menghadapi ancaman bencana tersebut, yaitu masyarakat yang tanggap, tagas dan Tangguh dalam menghadapi bencana. Ketika terjadinya ancaman bencana, masyarakat sudah tau apa yang harus mereka lakukan, dan dimana mereka harus melarikan diri ketempat yang aman. Jika masyarakat sudah siap dalam menghadapi ancaman bencana, maka ketika terjadinya bencana mereka sudah tidak lagi panik dan mereka akan lebih terarah. Selain itu meminimalisir dampak dari korban jiwa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu kapasitas desa. Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Desa memiliki kewenangan membuat kebijakan atau peraturan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Adanya kewenangan tersebut Pemerintah Desa perlu mengimplementasikan dengan menyinergikan berbagai elemen supaya dapat terwujud masyarakat yang tanggap, tagas, tangguh dalam menghadapi bencana. Sebuah desa mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut mampu untuk mengenali ancaman dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana.

Kalurahan atau desa yaitu pemerintah tingkat bawah dan masyarakat adalah pelaku utama dalam upaya penanggulangan bencana, dan menjadi kelompok pertama yang menerima dampak bencana. Oleh karena itu peningkatan kapasitas kalurahan atau desa dan masyarakat adalah upaya strategis untuk mewujudkan visi BNPB yaitu ‘Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana’. Salah satu programnya yaitu kalurahan atau desa Tangguh bencana (Destana). Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Desa Tangguh bencana yaitu desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana dan memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Upaya penanguhan bencana untuk masyarakat dilakukan oleh kalurahan atau desa secara mandiri atau dengan pihak lain untuk memastikan keberlanjutannya.

Menurut observasi penulis, bahwa di Kalurahan Harjobinangun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai mitigasi bencana khususnya tentang mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi. Tidak semua masyarakat mendapatkan pelatihan atau sosialisasi. Hanya sebagian masyarakat saja yang mendapatkan pelatihan atau simulasi dan mengetahui informasi mengenai mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi. Ada juga yang sama sekali tidak pernah mendapatkan informasi tersebut baik dari pemerintah desa. Sebagian kecil masyarakat mendapatkan informasi tentang mitigasi bencana melalui sekolah atau dari desa lain. Minimnya penyebaran informasi inilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Informasi mengenai mitigasi bencana sangat penting bagi semua lapisan masyarakat supaya masyarakat paham dan siap dalam menghadapi bencana. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah desa diharapkan mampu bertindak menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat desa, sebagai struktur pemerintahan, dan dapat berkontribusi secara positif dalam penanganan bencana

sekaligus menjadi pengerak, dapat memberi pemahaman kepada masyarakat secara optimal dalam mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi. Selain itu pelatihan, simulasi dan informasi diharapkan dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada semua elemen masyarakat. Bagi desa yang pemerintah desanya belum memiliki kapasitas yang baik, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam segala bidang, terutama berkaitan dengan hal mitigasi bencana.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana Gunung Merapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

“Bagaimana kapasitas Pemerintah Desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi di Kalurahan Harjobinangun?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

“Untuk mengetahui kapasitas Pemerintah Desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat tentang kapasitas dalam mitigasi bencana Gunung Merapi di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, dalam menambah pengetahuan tentang kapasitas Pemerintah Desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. *Governability*

Kooiman (1994) dalam Jurnal Pemekaran Daerah dan Persoalan *Governability* Lokal di Indonesia oleh Mardiyanto menjelaskan *governability* sebagai kemampuan *governing*, namun Kooiman lebih terperinci menjelaskan *governability* sebagai proses keseimbangan yang permanen antara dua hal *governing*, yaitu *governing needs* dan *governing capacities*. Menurut Kooiman, *governability* merupakan suatu ekspresi *governance* dalam arti penyesuaian yang absah (*Legitimate*) dan efektif atas *governing needs to capacities* dan *governing capacities to needs*. Menurutnya *needs* bukan sekedar sesuatu di dalam masyarakat dan *capacity* bukan sekedar menunjukkan perintah. *Need* dan *capacity* dalam kadarnya (dinamika dan interaksi), polanya (kompleksitas dan saling dilihat pada waktu yang sama sebagai sosial dan politik, publik dan *privat*, negara dan masyarakat dalam hubungan yang saling tergantung.

Menurut Sutoro Eko (2013:65) *governability* adalah sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi. Sedangkan menurut pendapat Pratikno dan Cornelis Lay (2007:14) adalah kapasitas pemerintah untuk mengelola dan menyediakan barang-barang politik (*political goods*). Dalam terminology politik, *political goods* adalah keamanan, pelayanan publik, tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi antara masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis yang kondusif, dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat. (Habodin 2015:111-112)

2. Kapasitas

Menurut Milen (2014:16) pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi tidak hanya terjadi satu kali. Merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang. Sedangkan menurut Morgan (dalam Haryanto 2014:14) kapasitas adalah sebagai kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.

Bank Dunia (dalam Haryanto 2014:17) kapasitas memiliki lima aspek yaitu: (1) pengembangan SDM, training, rekrutmen dan pemutusan pegawai professional, manajerial dan teknis, (2) keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen, (3) networking yang berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi dan interaksi formal informal, (4) lingkungan organisasi, yaitu aturan, undang-undang yang mengatur pelayanan publik, tanggungjawab dan kekuasaan, kebijakan serta daya dukung keuangan dan anggaran, dan (5) lingkungan secara luas yang meliputi faktor-faktor politik, ekonomi, dan kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Sedangkan untuk menerangkan kapasitas, menurut Hari dan Winarno 2010:22 (Mukdar 2019:11) bentuk kapasitas pemerintahan daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

- 1) Kapasitas responsive, kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah.
- 2) Kapasitas jaringan atau kerja sama, kemampuan pemerintah dan warga masyarakat mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas efektif.

Menurut Grindle 1997:22 (dalam Mukdar 2019:14-15) kapasitas memiliki tiga elemen yaitu:

- 1) Kebijakan kapasitas yaitu: kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar Lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan.
- 2) Implementasi kewenangan yaitu, kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
- 3) Operasional efisien yaitu, kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif dan efisien dan dengan tingkat kualitas yang memadai.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau suatu sistem dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mencapai target dan tujuan bersama. Kapasitas juga terdapat tiga elemen penting yang menjadi faktor penjelas dari kapasitas yaitu kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan, dan operasional efisien.

3. Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Desa memiliki kewenangan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa”. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa.

b. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” sedangkan Pasal 1 Ayat 3 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Menurut peneliti bahwa pemerintah desa yaitu orang-orang yang mempunyai tugas mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa

dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa (sekertaris desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan, kepala dusun) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d) Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- g) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- h) Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- i) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l) Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif;
- m) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa di bantu oleh aparatur desa baik sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan unsur lain seperti kepala dusun, pengurus RW, RT, tokoh agama, tokoh Pendidikan dan tokoh pemuda.

2) Sekertaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariatan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Unsur staf sekretariatan terdiri dari atas tiga bidang urusan:

- 1. Kepala urusan pemerintahan;
- 2. Kepala urusan pembangunan;
- 3. Kepala urusan administrasi

3) Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

4) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Untuk mengatasi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi melalui kewenangannya, maka pemerintah desa melakukan kerjasama dengan BPBD untuk meminimalisir dampak bencana Gunung Merapi.

4. Mitigasi Bencana

a. Pengertian Mitigasi Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat 1 “Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Sedangkan Pasal 1 Ayat 9 “Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 2 bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.” Kata terpadu dalam penanggulangan bencana penting karena masalah yang ditimbulkan terkait dengan berbagai sektor yang multi kompleks.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa mitigasi bencana adalah bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

b. Prinsip Penanggulangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 3 Ayat 2 yaitu:

1) Cepat dan tepat.

Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Keterlambatan dalam penanggulangan akan berdampak pada tingginya kerugian material maupun korban jiwa.

2) Prioritas.

Yang dimaksud dengan prinsip prioritas adalah apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

3) Koordinasi dan keterpaduan.

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

4) Berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna,

khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

5) Transparansi dan akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum

6) Kemitraan.

Penanggulangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kemitraan dalam penanggulangan bencana dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat luas termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Bahkan, kemitraan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri termasuk dengan pemerintahannya.

7) Pemberdayaan.

Pemberdayaan berarti upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. Negara memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar mengurangi dampak dari bencana.

8) Non Diskriminatif.

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminatif adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberi perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

9) Non proletisi.

Yang dimaksud dengan prinsip proletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

c. Tujuan Penanggulangan Bencana

Tujuan dari penanggulangan bencana yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya local;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d. Tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Prabencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

a. Dalam situasi tidak terjadi bencana yaitu:

a) Perencanaan penanggulangan bencana yang terdiri atas:

- 1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- 2) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- 3) Analisis kemungkinan dampak bencana;
- 4) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 5) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- 6) Alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

b) Pengurangan risiko bencana yang terdiri atas:

- 1) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- 2) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- 3) Pengembangan budaya sadar bencana;
- 4) Penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

c) Pencegahan risiko bencana yang terdiri atas:

- 1) Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

- 2) Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - 3) Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - 4) Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 5) Penguatan ketahanan social masyarakat.
- d) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah, dilakukan secara berkala dikoordinasikan oleh suatu Badan.
- e) Analisis risiko bencana.
- f) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- g) Pendidikan dan pelatihan.
- h) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi
- 1) Kesiapsiagaan
 - 2) Peringatan dini
 - 3) Mitigasi bencana

2. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana (response) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana; jumlah korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya: pencarian dan penyelamatan korban; pertolongan darurat dan/atau evakuasi korban;
- 4) pemenuhan kebutuhan dasar (kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan dan tempat hunian);
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan (bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia)

berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial;

- 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya penyelenggaraan penaggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan;
- 5) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 6) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 7) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 8) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- 9) pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat. Sebagai contoh, rekonstruksi Aceh pasca tsunami memerlukan waktu tidak kurang dari 5 tahun agar kondisi fisik dan mental, lingkungan dan teknis, serta prasarana ekonomi dibangun kembali dan diharapkan akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelum bencana.

- 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 6) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup tentang Kapasitas Pemerintah Desa, dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan pemerintah desa dalam mitigasi bencana Gunung Merapi.
2. Penyelenggaraan mitigasi bencana Gunung Merapi (prabencana, tanggap darurat, pasca bencana).
3. Evaluasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana Gunung Merapi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2013:2) dengan metode penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data dan mengamati mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) langsung ke sumber data dan peneliti adalahh instrument kunci. Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif, yaitu studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dalam penelitian dan jangkauan konseptual yang

lebih luas. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Penelitian ini melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). (Bogdan dan Biklen,1982)

2. Unit Analisis

a) Objek Penelitian

Objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumber objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut sosial situation atau situasi sosial terdiri dari 3 elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Sugiyono (2013:199)

Obyek penelitian yang akan diteliti adalah kerjasama Pemerintah Desa di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:216) subjek penelitian adalah seseorang yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini subyek yang dipilih adalah Pemerintah Desa, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan masyarakat. Adapun deskripsi narasumber jumlahnya sebanyak 6 orang.

Tabel 1.1
Nama Informan

No	Nama	Masyarakat
1	Fajar Akbar K, S.E., M. Si	Kepala Desa
2	Bunakir	Ulu-Ulu
3	Caecilia Sinta C D, S. Pd	Pangripta
4	Siti Nurhayati S. Pd	Tokoh Pendidikan
5	Sri Widayah	Tokoh Pemuda
6	Endarto	Ketua RT 02

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data (Sugiyono, 2016:193).

a) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

b) Wawancara

Wawancara adalah sejumlah pertanyaan terarah yang disusun sedemikian rupa untuk mengundang jawaban atas topik tertentu dengan tujuan mencari kebenaran serta menyampaikan informasi yang akurat, obyektif, impartial dan lengkap demi memenuhi hak asasi masyarakat memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan dalam format *one-on-one* (satu-lawan-satu) atau satu-dua pewawancara dengan lebih dari satu narasumber untuk mengungkapkan informasi tertentu bagi masyarakat atau menghibur pemirsa atau pendengar. Tapi, baik dalam format atau tujuannya, wawancara harus dilakukan dengan memperhatikan etiket, sopan santun yang normal, dan kode etik jurnalistik.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

d) Triangulasi

Triangulasi adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik Triangulasi biasa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:244).

Untuk menganalisis data, maka peneliti menganalisis data secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data baik kepustakaan maupun data dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan;

2) Identifikasi Data

Identifikasi data adalah mengelompokkan data-data untuk disusun secara sistematis;

3) Interpretasi Data

Intepretasi data adalah pembahasan data hasil penelitian baik berupa teori ataupun kenyataan di lapangan. Dalam hal ini peneliti juga melakukan cek dan ricek data;

4) Kesimpulan

Kesimpulan adalah mendeskripsikan hasil pembahasan dan analisa sehingga diketahui jawaban dari permasalahan yang ada, serta diharapkan mampu memberikan solusi yang baik.

BAB II

DESKRIPSI UMUM PROFIL KALURAHAN HARJOBINANGUN

A. Kondisi Geografis

1. Sejarah Kalurahan Harjobinangun

Harjobinangun merupakan sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kalurahan Harjobinangun awal terbentuk terdiri dari 3 (tiga) Kalurahan lama yaitu Kalurahan Mangunan, Kalurahan Dero, Kalurahan Turgogede, kemudian terjadi penggabungan yang sekarang menjadi Kalurahan Harjobinangun. Setelah penggabungan kalurahan Adapun daftar Pejabat Lurah yaitu:

- 1) AY. Marto Sutedjo, alamat Turgogede (dari berdiri – 1992)
- 2) Arisman, BA, alamat Mangunan (1993 – 2001)
- 3) Moeh. Sukardi, alamat Pelem (2002 – 2007)
- 4) Tri Haryono, SE, alamat Kaliwanglu Kulon (2008 – 2013)
- 5) Fajar Akbar Kurniawan, SE. Msi., alamat Blembem Lor (2014 – 2019)
- 6) Fajar Akbar Kurniawan, SE. Msi., alamat Blembem Lor (2020 – 2025)

2. Batas Administrasi

Wilayah Kalurahan Harjobinangun terletak di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem dan Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak

Kalurahan Harjobinangun dibagi menjadi 11 (sebelas) Padukuhan yang terdiri dari 52 RT dan 24 RW

Tabel 2.1
Jumlah RW dan RT Perpadukuhan

No	Nama Padukuhan	RT	RT	Keterangan
1	Jurangjero	I	1,2	Pandansaren
		II	2,4	Jurangjero
		III	5,6	Klarangan
2	Trojayan	IV	1,2	Tebonan dan Trojayan
		V	3,4	Trojayan dan Randujayan
		VI	5,6	Ngampel
3	Blembem Lor	VII	1,2	Blembem Lor
			3,4,5	Blembem Lor dan Mangunan
4	Ngelo	IX	1,2	Ngelo dan Nglingi
		X	3 4,5	Dero Kulon
5	Blembem Kidul	XI	1,2	Dero Wetan
		XII	3,4	Blembem Kidul

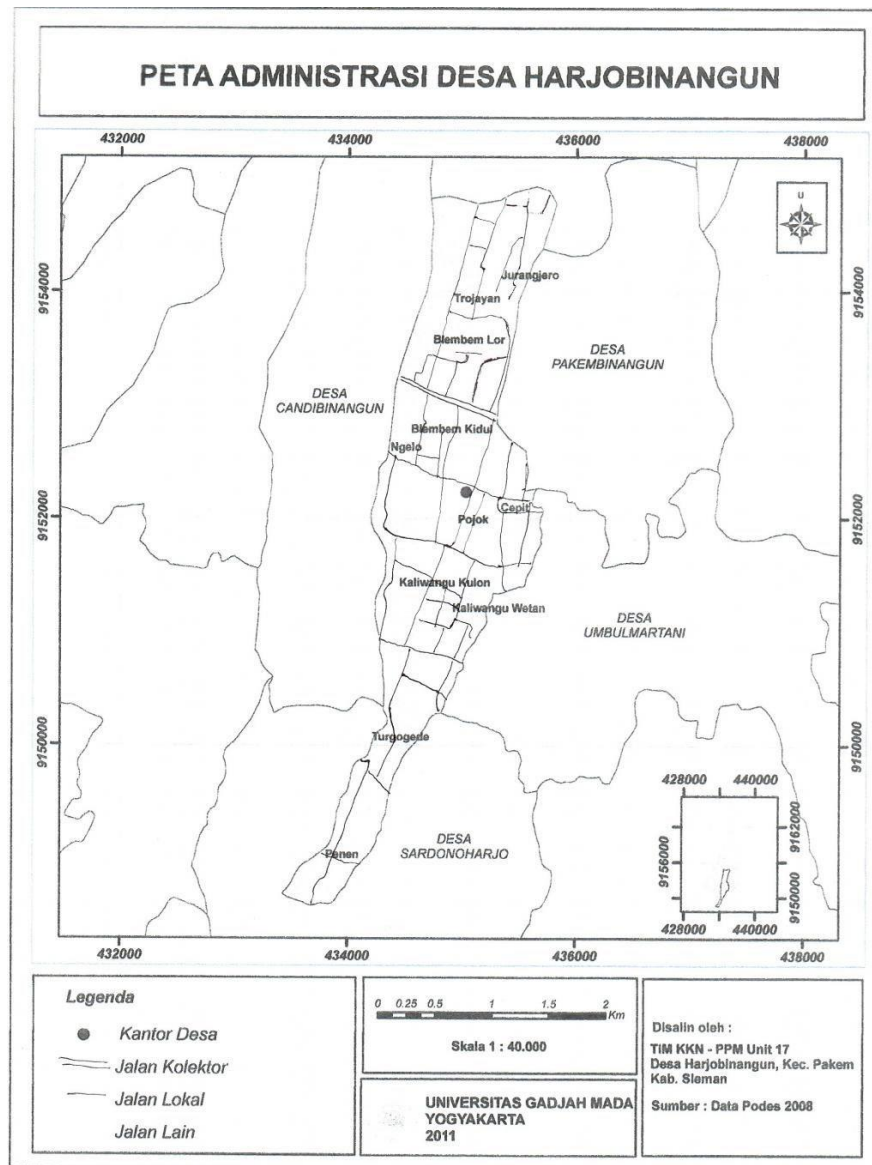
6	Cepit	XIII XV	1,2 3,4	Cepit dan Katen Sempol
7	Pojok	XVI XVII	1,2 3,4,5	Pojok Beji dan Ngawen
8	Kaliwanglu Kulon	XVIII XIX	1,2 3,4	Kaliwanglu Kulon dan Bendosari Kaliwanglu Kulon
9	Kaliwanglu Wetan	XX XXI	1,2 3,4	Kaliwanglu Wetan dan Kali Dadap Barisan, Turgorejo dan Turgogede
10	Turgogede	XXII XXIII	1,2 3,4	Turgogede Turgogede dan Turirejo
11	Penen	XXIV	1,2,3 4,5,6	Penen, Pelem dan GPA

(Sumber: RPJMDesa Desa Harjobinangun,2020)

3. Letak Wilayah

Gambar 2.1

Peta Kalurahan Harjobinangun



4. Luas Wilayah

Kalurahan Harjobinangun salah satu dari 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Pakem. Jarak tempuh ke Kapanewon Pakem 1 km, jarak tempuh ke Kabupaten Sleman 8 km dan jarak tempuh ke provinsi 18 km. Kalurahan Harjobinangun mempunyai wilayah seluas; 5.520 Km² (552,0 Ha) dengan jumlah penduduk: \pm 7.167 dengan jumlah kepala keluarga: \pm 2.699. Iklim Kalurahan Harjobinangun sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Harjobinangun, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan disbanding dengan kondisi desa-desa yang lain.

Adapun rincian penggunaan lahan di Kalurahan Harjobinangun tahun 2021 sebagai berikut:

Table 2.2
Jumlah Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas Tanah (Hektar)
1	Tanah Sawah	302,7465
2	Tanah Tegal	4,1700
3	Tanah Pekarangan	87,3360
4	Wedi Kengser	1,2000
5	Sungai	78,4200
6	Jalan	72,4125
7	Kuburan	3,9150
8	Lapangan Olahraga	0,8000
9	BPP	1,0000
	Jumlah	552,0000 Hektar

(Sumber: Harjobinangunsid.slemankab.go.id)

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, luas wilayah yang ada di Kalurahan Harjobinangun masing-masing karakteristik penggunaan lahan yang berbeda-beda. Adapun penggunaan lahan terluas digunakan untuk persawahan dengan luas 302,7465 Ha dan untuk penggunaan lahan terkecil digunakan untuk lapangan olahraga dengan luas 0,8000 Hektar.

B. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Kalurahan Harjobinangun sampai bulan Desember 2020 sebanyak 6.415 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 3.158 jiwa dan perempuan 3.257 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 2.257 KK terdiri dari laki-laki 1.706 KK dan perempuan 551 KK.

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data penduduk perpadukuhan Kalurahan Harjobinangun menurut jenis kelamin berdasarkan populasi perwilayah sebagai berikut:

Table 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perpedukuhan

No	Padukuhan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Blembem Kidul	227	252
2	Blembem Lor	340	323
3	Cepit	376	415
4	Harjobinangun	3	1
5	Jurangjero	346	349
6	Kaliwanglu Kulon	294	311
7	Kaliwanglu Wetan	322	313
8	Ngampel	72	74
9	Ngelo	252	277
10	Penen	401	392
11	Pojok	341	345
12	Randujayan	7	9
13	Trojayan	274	286
14	Turgogede	272	293
Total		3.527 Orang	3.640 Orang

(Sumber: Harjobinangunsid.slemankab.go.id)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kalurahan Harjobinangun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir setara dengan perbandingan laki-laki 3.527 jiwa dan perempuan 3.640 jiwa.

2. Jumlah RT dan KK Menurut Populasi Perpedukuhan

Data RT dan KK perpadukuhan Kalurahan Harjobinangun berdasarkan populasi perwilayah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah RT dan KK Perpedukuhan

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK
1	Blembem Kidul	Bernadusn Rinawan	5	187
2	Blembem Lor	Jatmiko Ari Wibowo	5	259
3	Cepit	Suwarno	6	274
4	Harjobinangun		1	1
5	Jurangjero	Udi Karmojo	9	273
6	Kaliwanglu Kulon	Banteng Yuniarto	5	217
7	Kaliwanglu Wetan	Dulpadi	5	240
8	Ngampel		2	63
9	Ngelo	Agus Sulistyantoro	5	215
10	Penen	Suryanto	9	267
11	Pojok	Joni Praptomo	10	258
12	Randujayan		1	5
13	Trojayan	Aminonis Bima Nugraha	10	222
14	Turgogede	Daryanto	6	218
Total			79 RT	2.699 KK

(Sumber: Harjobinangunsid.slemankab.go.id)

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berikut data mengenai kelompok umur masyarakat Kalurahan Harjobinangun,

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	0 s/d 1	124	52	72
2	2 s/d 4	179	98	81
3	5 s/d 9	458	233	225
4	10 s/d 14	523	287	236
5	15 s/d 19	547	262	285
6	20 s/d 24	536	267	273
7	25 s/d 29	473	240	233
8	30 s/d 34	423	201	222
9	35 s/d 39	501	240	261
10	40 s/d 44	556	268	288
11	45 s/d 49	604	287	317
12	50 s/d 54	516	267	249
13	55 d/s 59	426	204	222
14	60 s/d 64	371	163	208
15	65 s/d 69	300	149	151
16	70 s/d 74	239	103	136
17	75 Keatas	604	267	337
TOTAL		7.380 Orang	3.588 Orang	3.792 Orang

(Sumber: Harjobinangunsid.slemankab.go.id)

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah penduduk yang ada di Kaluraha Harjobinangun bervariasi mulai dari usia non produktif hingga usia produktif. Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa struktur umur terbagi ke dalam 17 (tujuh

belas) bagian. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa usia 45 sampai 49 tahun dan usia diatas 75 tahun menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 604 jiwa.

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi Kalurahan Harjobinangun sebagai berikut:

1. Berdasarkan Agama

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Islam	6207	3040	3167
2	Kristen	119	58	61
3	Katholik	834	427	407
4	Budha	1	1	0
5	Khonghucu	22	10	12
Total		7536 Orang	3532 Orang	3643 Orang

(Sumber: Harjobinangunsid.slemankab.go.id)

Mayoritas masyarakat di Kalurahan Harjobinangun beragama Islam dengan jumlah penganut sebanyak 6207 orang, sedangkan agama lain ada Katholik 834 orang, Kristen 119 orang, Khonghucu 22 orang dan Budha 1 orang, untuk agamaHindu di Kalurahan Harjobinangun tidak ada.

2. Keadaan Ekonomi

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat di Kalurahan Harjobinangun sebagai berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Pelajar/Mahasiswa	1380	684	696
2	Belum/Tidak Bekerja	1191	636	555
3	Karyawan Swasta	1134	692	442
4	Mengurus Rumah Tangga	1077	0	1077
5	Wiraswasta	590	410	180
6	Buruh Tani/Perkebunan	451	277	174
7	Petani/Perkebunan	321	177	144
8	Pensiunan	262	182	80
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	201	113	88
10	Buruh Harian Lepas	172	135	37
11	Guru	97	29	68
12	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	30	30	0
13	Lainnya	29	19	10
14	Pedagang	28	10	18
15	Perangkat Desa	24	22	2
16	Perdagangan	24	10	14
17	Kepolisian RI (POLRI)	21	21	0
18	Sopir	20	20	0
19	Karyawan Honorer	19	8	11
20	Karyawan BUMN	18	14	4
21	Dosen	17	8	9
22	Dokter	13	4	9
23	Perawat	13	1	12

24	Tukang Batu	8	8	0
25	Tukang Jahit	6	2	4
26	Bidan	4	0	4
27	Tukang Kayu	3	3	0
28	Apoteker	3	0	3
29	Karyawan BUMD	3	1	2
30	Biarawati	3	2	1
31	Peternak	3	3	0
32	Mekanik	2	2	0
33	Pengacara	2	2	0
34	Pembantu Rumah Tangga	2	0	2
35	Peneliti	1	1	0
36	Kepala Desa	1	1	0
37	Buruh Peternakan	1	1	0
38	Industri	1	1	0
39	Wartawan	1	1	0
40	Pelaut	1	1	0
41	Pastor	1	1	0
42	Anggota DPRD Provinsi	1	1	0
43	Seniman	1	1	0
44	Notaris	1	0	1
45	Konstruksi	1	1	0
46	Penyiar Televisi	1	1	0

(Sumber: harjobinangunsid.slemankab.go.id)

Gambaran umum mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Harjobinangun dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Potensi sumber daya yang ada meliputi pertanian, perkebunan dan perikanan. Mayoritas warga Desa Harjobinangun bermata pencarian

sebagai petani, buruh tani atau perkebunan. Selain itu banyak juga yang bermata pencarian sebagai pedagang karena sebagian jalan di Desa Harjobinangun berstatus sebagai jalan nasional sehingga dimungkinkan untuk tumbuhnya perekonomian desa pada sektor perdagangan.

3. Kemampuan Keuangan Kalurahan

Anggaran Pendapatan Kalurahan terdiri dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- b. Sumber pendapatan Kalurahan terdiri dari:
 1. Pendapatan asli Kalurahan
 2. Bantuan dari Pemerintah Daerah
 3. Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 4. Sumbangan dari pihak ketiga
 5. Pinjaman Kalurahan
 6. Lain-lain pendapatan yang sah

D. Sarana dan Prasarana

a. Jalan Kalurahan

Status jalan di Kalurahan Harjobinangun ada 3 (tiga) kategori:

1. Jalan Nasional panjangnya $\pm 1,5$ km dalam kondisi cukup baik sebagai sarana transportasi
2. Jalan Kabupaten panjangnya ± 6 km yang kondisinya cukup baik
3. Jalan Kalurahan panjangnya ± 20 km Sebagian besar kondisinya rusak sehingga cukup mengganggu kelancaran transportasi.

b. Jembatan

Terdapat 3 (tiga) jembatan yang dilintasi jalan Nasional yaitu: Jembatan Kali Trasi, Kali Pelang, Kali Klanduhan dan Kali Dahulu yang kondisinya baik dan 2 (dua) jembatan yang dilintasi oleh jalan Kabupaten yaitu di jembatan di Padukuhan Penen dan di Padukuhan Kaliwanglu serta 10 (sepuluh) jembatan yang dilintasi jalan Kalurahan.

c. Saluran Irigasi

1. Saluran primer panjangnya 3.200 m, kondisi rusak 1.500 m
2. Saluran sekunder panjangnya 34.000 m, kondisinya rusak 18.000 m
3. Saluran tersier panjangnya 25.600 m, kondisi rusak 12.500 m

d. Telekomunikasi

Saluran telepon tetap (PSTN) sudah masuk ke Sebagian besar wilayah Kalurahan Harjobinangun disamping penggunaan HP (*Hand Phone*).

e. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada di Kalurahan Harjobinangun meliputi:

- 1) Dokter umum yang praktek 1 orang
- 2) Dokter gigi yang praktek 1 orang
- 3) Tenaga paramedis 6 orang
- 4) Bidan yang praktek 1 orang

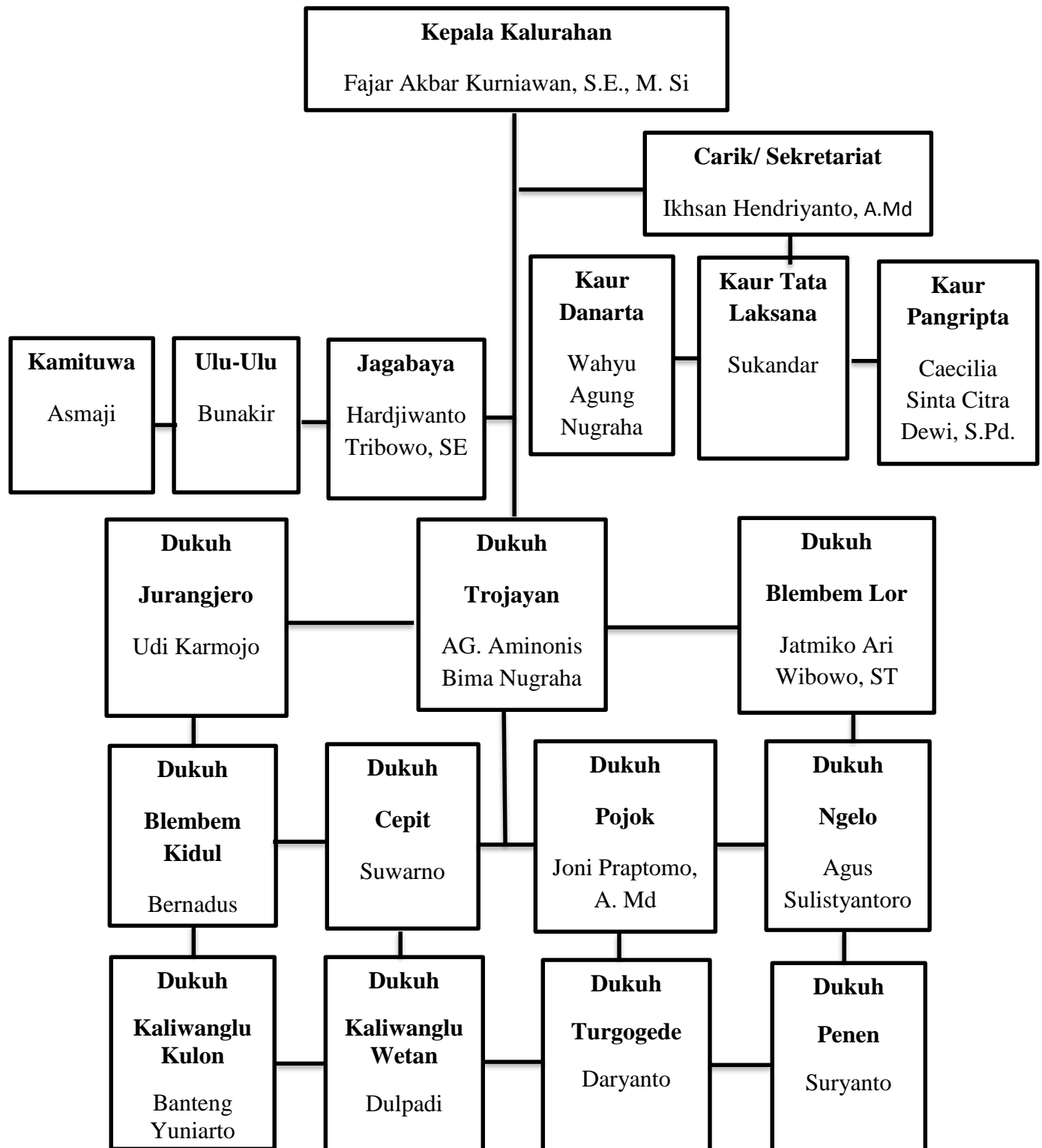
Prasarana Kesehatan yang ada di Kalurahan Harjobinangun meliputi:

- 1) Puskesmas pembantu 1 unit di Kaliwanglu
- 2) Rumah bersalin 1 unit di Mangunan
- 3) Posyandu ada 14 di 11 Padukuhan

E. Struktur Pemerintahan Kalurahan Harjobinangun

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Harjobinangun



(Sumber: harjobinangunsid.slemankab.go.id)

Tabel 2.8

Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Harjobinangun

Ketua	:	Prihamanto, S. Pd.
Wakil Ketua	:	Imam Indriadi, S. Pd.
Sekretaris	:	Wagimin Arif Rahmatullah
KA. Pokja Pemerintahan	:	Suparna
KA. Pokja Pembangunan	:	Bambang Widodo
Anggota	:	Irka Aryana
Anggota	:	Triyono

(Sumber: harjobinangunsid.slemankab.go.id)

Gambar 2.2

Daftar anggota FPRB

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Harjobinangun
 Nomor : 01 Tahun 2021
 Tanggal : Januari 2021
 Tentang :

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Penanggung Jawab Dan Penasehat	Fajar Akbar Kurniawan, S.E., M.Si Ahmadi	Lurah LPMD
2	Ketua Pelaksana Harian	Bunakir HS	Pamong
3	Wakil Ketua	Eko Susilo Nugroho	Relawan
4	Sekretaris	Agustina Sulistyani Sukandar	PKK Pamong
5	Bendahara	Joni Prptomio, A.Md Sri Lestari	Pamong/Dukuh PKK
6	Bidang Informasi Komunikasi dan Peringatan Dini	Dedang Heri Prasongko Suwandi	Relawan Relawan
7	Bidang Pertolongan Pertama	Refiana Agusnanta Wahyu Wenang Nugraha Wardiyono Rustini	RW Relawan Relawan PKK
8	Bidang Kaji Cepat dan Evakuasi	Handika Rakhmawan H Agus Wiranto Andri Winarto	Relawan Relawan RT
9	Bidang Barak dan Pengungsian	Jupriyanto Muhammad Effendi Suwandi Apriliyanto Hepy Pranowo	RT RW Relawan Relawan Relawan
10	Bidang Keamanan	Bekti Antoro, SE Pariyo Linmas Harjobinangun	Babinkamtibmas Babinsa

11	Bidang Logistik	Caecilia Sinta Citra Dewi, S.Pd Hernanto Nursyamsi Tri Wahyudi Estiana	Pamong Staff Kalurahan Relawan Relawan
12	Bidang Dapur Umum	Sagiman Esti Widarsih Heru Pumama Anifah Sihmawati	RT PKK Relawan PKK
13	Koordinator Dusun dan Relawan	Dukuh se-Kalurahan Harjobinangun	

Ditetapkan di : Harjobinangun

Pada Tanggal : Januari 2021

Lurah Harjobinangun

FAJAR AKBAR KURNIAWAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Saibani, Djati H, 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Media Pustaka.
- Abdullah Alamudi, 2017. *Teknik Melakukan & Melayani Wawancara*. Bandung, Kafai; PT Mizan Pustaka; Anggota IKAPI.
- Ferad, Puturuhi, 2015. *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Riduwan, 2015. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung, Alfabeta, CV.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulanga Bencana Daerah.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD.

Skripsi:

Andreas Norbertus Lede, 2019. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Infastruktur Desa*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta.

Asep Saeful Mukdar, 2019. *Kapasitas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Skripsi. Ilmu Politik. Jawa Barat.

Jurnal:

Eko Sutoro, 2021. *Government Making Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Di jurnal.apmd.ac.id

Ningsi, Hamny Juliana. 2021. *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pelelangan Tanah Kas Desa dilihat dari Prespektif Governability*. Apmd. Yogyakarta. <http://Repo.Apmid.Ac.Id>

Purnomo Hadi, Hargo Utomo, 2008. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 405-407

Web:

<https://bpbid.slemankab.go.id>

<https://harjobinangunsid.slemankab.go.id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Merapi

<https://irenaishiteru89.wordpress.com>

<https://www.antaranews.com>

<https://www.liputan6.com>

<https://www.sembada.id/2017/10/forum-pengurang-resiko-bencana.html>

<https://www.scribd.com>

<https://tirto.id>

LAMPIRAN



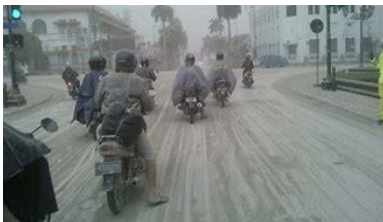
(Erupsi Gunung Merapi 2006)



(Erupsi Gunung Merapi 2010)



(Dampak lingkungan erupsi 2010)



(Dampak erupsi 2010 sampai di Kota Yogyakarta)



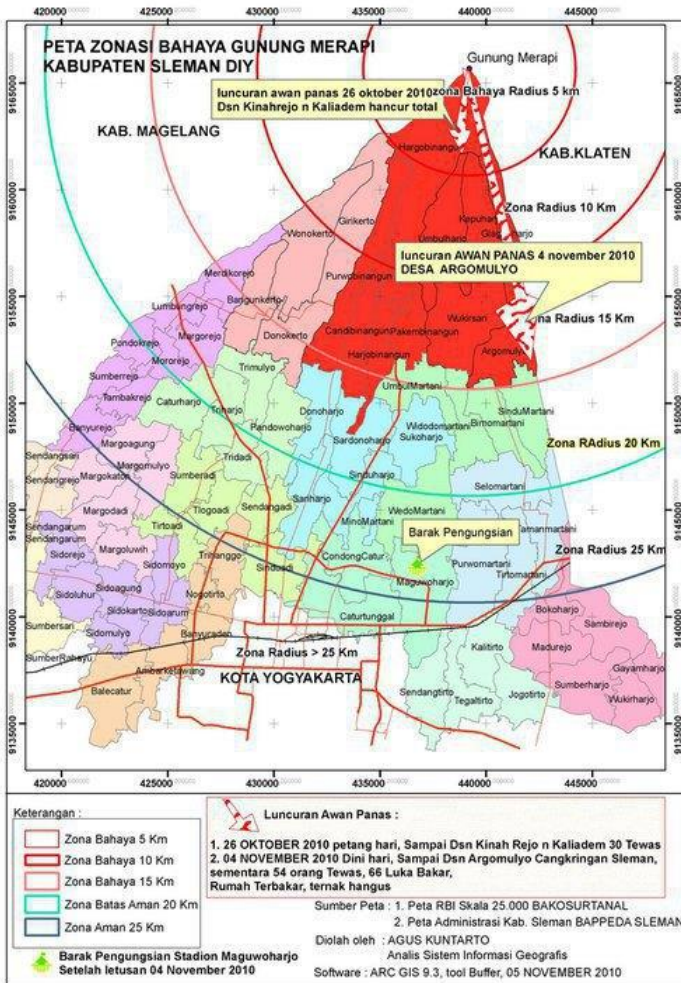
(Dampak pertanian erupsi Gunung Merapi 2010)



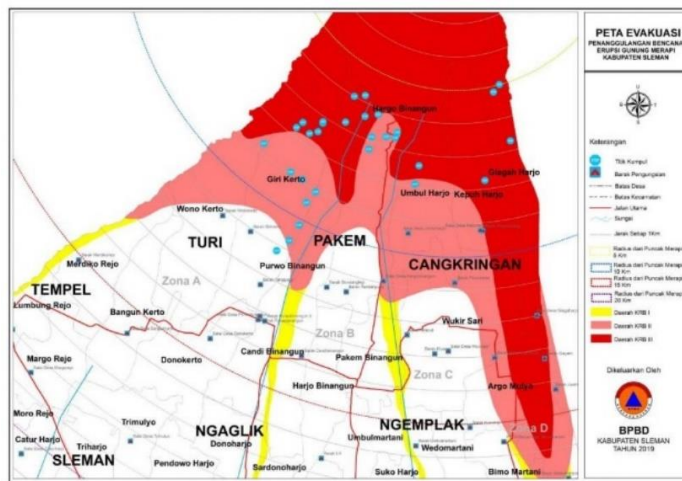
(Letusan Gunung Merapi 2018)



Senin 3-1-2022 Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava pijar terlihat dari Srumbung, Magelang, Jawa Tengah.



(Peta zona bahaya Gunung Merapi)



(Peta evakuasi penanggulangan bencana Gunung Merapi)



(Level status bahaya Gunung Merapi)

Sarana – Prasarana penanggulangan bencana di Kalurahan Harjobinangun:



Tower



Gudang logistik KSB